

## ABSTRAK

*Meningkatnya jumlah penduduk dan perluasan wilayah pemukiman di Kota Yogyakarta mengakibatkan semakin meningkatnya timbunan sampah yang tidak terkelola. Fasilitas pengelolaan sampah seperti TPS (Tempat Penampungan Sementara) yang disediakan oleh pemerintah setempat belum sepenuhnya dapat melayani masyarakat yang ada di Kota Yogyakarta khususnya di Kecamatan Tegalrejo, Jetis, Gedongtengen, Ngampilan, Wirobrajan, Kraton, dan Mantrirejon. Hal ini mengakibatkan munculnya TPS ilegal akibat dari praktek pembuangan sampah secara liar yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Perlu adanya pengelolaan terintegrasi dengan melakukan pemetaan sebaran TPS ilegal di Kota Yogyakarta yang dapat dilakukan dengan metode sensus TPS ilegal yang sesuai dengan kriteria dengan menggunakan bantuan Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk mengetahui dan menggambarkan lokasi dan juga sebaran TPS ilegal. Data penelitian diperoleh langsung dengan pengamatan dan pengukuran dilapangan secara langsung serta studi pustaka. Semua data yang didapatkan baik itu bersifat geografis, deskriptif dan juga numerik diolah dan dipetakan dengan menggunakan perangkat lunak ArcMap 10.2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tujuh kecamatan yang menjadi objek penelitian yang ada di Kota Yogyakarta, Kecamatan Tegalrejo memiliki jumlah TPS ilegal terbanyak dengan jumlah 4 TPS ilegal, Kecamatan Wirobrajan dan Mantrirejon ditemukan 3 TPS ilegal, Kecamatan Gedongtengen, Ngampilan, dan Wirbrajan ditemukan 1 TPS ilegal, sedangkan Kecamatan Kraton sama sekali tidak ditemukan TPS ilegal. Total keseluruhan TPS ilegal dari tujuh kecamatan yang ada di Kota Yogyakarta yaitu 13 lokasi TPS ilegal yang sebarannya dipengaruhi oleh jarak dari sungai, jenis peruntukan lahan, jenis jalan, kepadatan penduduk dan ketersediaan TPS legal.*

*Kata kunci : Kota Yogyakarta, TPS ilegal, Pemetaan, Sistem Informasi Geografis (SIG)*

## **ABSTRACT**

*The increasing number of population and the expansion of residential areas in Yogyakarta City resulted in an increase of unmanaged waste. Waste management facilities such as legal dumping sites provided by the local government have not been fully able to serve the existing community in Yogyakarta City, especially in Tegalrejo, Jetis, Gedongtengen, Ngampilan, Wirbrajan, Kraton, and Mantrirejon District. This resulted in the emergence of illegal dumping resulting from illegal waste disposal practices conducted by local communities. It needs an integrated management by mapping the illegal dumping in Yogyakarta City which can be done by using illegal dumping census method according to criteria by using Geographic Information System (GIS) to know and describe the location and also illegal waste distribution. Research data is obtained directly with direct observation and measurement in field and literature study. All data obtained either geographically, descriptively and numerically are processed and mapped using ArcMap 10.2 software. The results showed that from seven districts that were the object of research in Yogyakarta city, Tegalrejo district had the highest number of illegal dumping with 4 illegal dumping sites, Wirbrajan and Mantrirejon districts found 3 illegal dumping sites, Gedongtengen, Ngampilan, and Wirbrajan districts found 1 illegal dumping site, while Kraton District was not found illegal dumping. The total number of illegal dumping from seven districts in Yogyakarta City are 13 illegal dumping sites whose distribution is influenced by distance from the river, type of land use, type of road, population density and availability of legal dumping sites.*

*Keywords : Yogyakarta City, Illegal dumping, Mapping, Geographic Information System (GIS)*